

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2020). *sensus.bps.go.id/main/index/sp2020*. Diambil kembali dari bps.go.id: <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>
- Christian, F. F., & Aribowo, I. (2021). PENGAWASAN KEPATUHAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK STRATEGIS DI KPP PRATAMA SUKOHARJO. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(No.2), 102-107.
- Cristina. (2021). Diambil kembali dari pajakku.com: <https://www.pajakku.com/read/606fad3eb01ba1922cca764/Kepatuhan-Perpajakan-Apa-Signifikansinya>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2001). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-741/PJ./2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor. Jakarta, Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2001). Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-722/PJ./2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan. Jakarta, Indonesia: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2020 Tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Dalam Rangka Perluasan Basis Pajak. Jakarta, Indonesia: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2020*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Handayani, T. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengawasan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tegal (Studi Empiris pada UMKM yang Terdaftar Sebagai WPOP di KPP Pratama Tegal. *Skripsi*. Tegal, Republik Indonesia: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal.
- Husyaini, A. A. (2021). Tinjauan Tingkat Kepatuhan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di KPP Madya Palembang Pada Tahun 2020. *KTTA*. Tangerang Selatan: Jurusan Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Kementerian Keuangan. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

- Kementerian Keuangan. (2020). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- ONLINEPAJAK. (2018, 08 12). Diambil kembali dari [online-pajak.com: https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pengelompokan-jenis-jenis-pajak-dan-penjelasan](https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pengelompokan-jenis-jenis-pajak-dan-penjelasan)
- Rahmadhany, R. (2018). Tinjauan Atas Pelaporan dan Pembayaran PPh Final 4 Ayat 2 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan Dikaitkan Dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajaknya. *KTTA*. Tangerang Selatan: Jurusan Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021*. Jakarta.
- Rustiyaningsih, S. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Widya Warta: Jurnal Ilmiah Universitas Katolik Widya Mandala Madiun*, 44-54.
- Salendu, I. (2017). Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan atas Pelaksanaan Self Assesment System dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2).
- Santosa, W., & Sadimin. (2012). *Bahan Ajar PPh Pemotongan/Pemungutan*. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Setiawan, S. (2021, 08 26). [gurupendidikan.co.id/pengertian-pengawasan/](https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pengawasan/). Diambil kembali dari [gurupendidikan.co.id: https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pengawasan/](https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pengawasan/)
- Supadmi, N. L. (2009). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 4(2), 1-14.
- Ubaidillah, R. M. (2019). Menguak Kepatuhan Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah Atau Bangunan (Studi Kasus KPP Pratama Pamekasan). *Doctoral dissertation, Universitas Wiraraja*.
- Utami, P. I. (2019). Tinjauan Kepatuhan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Selain PP Nomor 23 Tahun 2018 di KPP

Pratama Purwokerto Tahun 2018. *KTTA*. Tangerang Selatan: Jurusan Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN.

Vanomy, A. E. (2021). Analisa Dampak Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final Untuk UMKM Terhadap Penerimaan Pajak Negara Di Kota Batam Prov. Kepri. *PROFIT: JURNAL ADMINISTRASI BISNIS*, 1-12.

Widomoko, & Nofryanti. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi oleh Account Representative (AR) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Menteng Satu Jakarta Pusat). *Jurnal Renaissance*, 132-146.

Witono, B. (2008). Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 196-208.

Zulvina, S. (2011). *Bahan Ajar Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.